

Tantangan Etika Birokrasi Di Era Revolusi 5.0

Hikmah Muhaimin¹, Iqma Yuliasari², Nindy Lulu Nur Hidayah³

^{1,2,3} Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Majapahit

Corresponding Author: hikmahmuhaimin@gmail.com, iqmaayuliasari@gmail.com, nindylnh@gmail.com

Kata Kunci:

Etika Birokrasi;
Good Governance;
Revolusi Industri 5.0.

Abstrak: Birokrasi Indonesia memainkan kiprah penting pada konteks revolusi industri 5.0. Menjaga etika birokrasi sama pentingnya bagi seseorang birokrat seperti halnya bersikap fleksibel dalam menghadapi kemajuan teknologi. Dengan demikian, peneliti mengajukan beberapa permasalahan, diantaranya bagaimana mempersiapkan dan berbagi asal daya manusia birokrasi agar mempunyai kemampuan dan kompetensi yang beretika sinkron dengan tuntutan Revolusi Industri 5.0 dan apa saja tantangan etika yang timbul pada aplikasi tugas serta pelayanan publik di era Revolusi Industri 5.0. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Mengkaji suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok orang secara kolektif dikenal menjadi penelitian kualitatif. Studi literatur adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data. Dengan menggunakan metode studi literatur ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai kesulitan-kesulitan yang terkait dengan etika birokrasi dalam konteks Revolusi 5.0. emuan penelitian ini membagikan lima hambatan primer yang perlu diatasi oleh birokrasi untuk mempertahankan kompas etika mereka pada zaman sekarang. Pertama, persoalan privasi dalam menghadapi samudera berita. prosedur pemecahan yang diskriminatif ialah yang kedua. Ketiga, krisis akuntabilitas "algokrasi". Kesenjangan digital dalam layanan publik berada di urutan keempat. Kelima, menurunnya nilai-nilai kemanusiaan. konklusi jurnal ini menekankan betapa pentingnya menerapkan konsep rapikan kelola yang baik pada pelayanan publik untuk meningkatkan standar tata kelola pemerintahan. kesimpulan studi ini mencatat bahwa meskipun ada upaya untuk memasukkan prinsip-prinsip moral seperti profesionalisme, tanggung jawab, dan integritas, ketidakfleksibelan institusional, kesenjangan isu, serta dilema nepotisme dan korupsi terus Mengganggu penerapannya.

Keyword:

Bureaucratic Ethics;
Good Governance;
Industrial Revolution
5.0.

Abstract: The Indonesian bureaucracy plays an important role in the context of the industrial revolution 5.0. Maintaining bureaucratic ethics is as important for a bureaucrat as being flexible in dealing with technological advances. Thus, the researcher raises several problems, including how to prepare and share the origin of bureaucratic human resources so that they have ethical abilities and competencies in sync with the demands of the Industrial Revolution 5.0 and what are the ethical challenges that arise in the application of tasks and public services in the era of the Industrial Revolution 5.0. This research uses a qualitative methodology. Examining a program, event, activity, process, or group of people collectively is known as qualitative research. Literature study is the method used in this study to obtain data. By using this literature study method, researchers can gain a comprehensive understanding of the difficulties related to bureaucratic ethics in the context of the 5.0 Revolution. This study shares five primary obstacles that need to be overcome by bureaucracies to maintain their ethical compass in this day and age. First, the issue of privacy in facing the ocean of news. The discriminatory cracking procedure is the latter. Third, the "algocracy" accountability crisis. The digital divide in public services is fourth. Fifth, the decline of human values. The conclusion of this journal emphasizes how important it is to apply the concept of good governance to public services to improve governance standards. Conclusion The study notes that despite efforts to incorporate moral principles such as professionalism, responsibility, and integrity, institutional inflexibility, issue gaps, and dilemmas of nepotism and corruption continue to interfere with their implementation.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang sedang berkembang di Asia Tenggara, Indonesia telah mulai mempersiapkan diri buat menyambut apa yang diklaim sebagai revolusi industri 5.0, atau era transformasi digital. Gelombang perubahan ini ditandai dengan meluasnya penggunaan teknologi terkini seperti otomatisasi, Internet of Things (IoT), serta kecerdasan buatan (AI) pada berbagai bidang usaha. Kehidupan warga dan sikap sosial telah sangat dipengaruhi oleh revolusi industri (Fadli, 2021). Indonesia bertujuan buat memanfaatkan iklim ekonomi global ketika ini yang semakin kompetitif buat menaikkan pembangunan ekonomi, produktivitas, serta daya saing. tetapi, hal ini membutuhkan arahan dari berbagai sumber agar asal daya insan dapat mengikuti perkembangan zaman, mengingat keragaman geografis, kesenjangan digital, serta kebutuhan buat meningkatkannya.

Birokrasi Indonesia memainkan kiprah krusial dalam revolusi industri kelima ini. Menjaga etika birokrasi sama pentingnya bagi seorang birokrat seperti halnya bersikap fleksibel dalam menghadapi kemajuan teknologi. Darwin (1999) menyatakan pada (Zega, 2018) bahwa etika artinya standar moral yang diterima oleh suatu komunitas yang memandu perilaku seseorang dalam korelasi dengan orang lain serta rakyat secara holistik, mempromosikan harmoni serta kesadaran moral. J.B. Kristiadi (1994:93) pada (Reonal et al., 2024) mendefinisikan birokrasi sebagai organisasi dengan basis sumber daya manusia yang akbar dan peran serta tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik. Birokrasi juga mempunyai kerangka kerja organisasi yang dapat dipahami. pada situasi ini, birokrasi berperan menjadi pemerintah, penyedia layanan publik, serta penyelenggara negara. Mengakui pentingnya etika pemerintah tidak hanya berarti mengawasi apa yang boleh serta tidak boleh dilakukan oleh pegawai negeri, namun juga bekerja buat meningkatkan profesionalisme mereka sampai pada titik di mana perbuatan dan perilaku mereka mencerminkan prinsip-prinsip moral yang bisa mempertinggi pelayanan masyarakat. Hasilnya, birokrasi pemerintah yang bersih serta ahli bisa terbentuk (Maindoka et al., 2017).

Kata "tata kelola pemerintahan yang baik" dan "etika birokrasi" mempunyai keterkaitan yang erat, dimana yang pertama mempengaruhi yang kedua. Prinsip-prinsip rapikan kelola pemerintahan yang baik, dari Hardiwinoto (2017) dalam (Karya Pamungkas & Rosyanfikri, 2022), mengacu di proses pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Keterlibatan rakyat, penghormatan terhadap aturan, pelayanan masyarakat, pembangunan mufakat, efektivitas dan efisiensi, keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, serta tanggung jawab adalah sembilan pilar rapikan kelola pemerintahan yang baik. Mematuhi nilai-nilai seperti tanggung jawab,

keterbukaan, dan integritas artinya dasar yang sangat krusial untuk mengarahkan perubahan digital dengan cara yang melayani kepentingan publik.

E-government artinya salah satu cara revolusi industri 5.0 dirasakan pada sektor publik. E-government artinya inovasi yang diprakarsai oleh pemerintah yang berpusat pada teknologi informasi, dengan tujuan mengoptimalkan kualitas layanan publik. Metode ini memberikan lebih poly cara lain kepada individu buat mendapatkan data yang mereka inginkan dengan simpel dengan menyampaikan fleksibilitas dalam mengakses informasi publik. Penerapan e-government harus berdasarkan pada kebijakan yang dikembangkan dengan baik serta planning pembangunan yang terfokus buat mencapai rapikan kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi layanan yang diberikan pada rakyat (Wirawan, 2020).

Kecerdasan buatan mulai mendukung pengambilan keputusan, kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data publik mulai muncul, dan proses layanan digital yang membutuhkan kecepatan respons dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam prosedur administratif. Tuntutan perubahan teknologi ini menghadirkan tantangan baru bagi etika birokrasi. Meskipun demikian, akuntabilitas yang lebih besar oleh pejabat atas kegiatan mereka juga merupakan kebutuhan dari keterbukaan yang dimungkinkan oleh teknologi.

Peneliti mengajukan beberapa rumusan berdasarkan uraian di atas, dimulai dari pertanyaan berikut: dilema ethical apa yang muncul ketika kewajiban dan pelayanan publik dilakukan di generation Revolusi Industri 5.0? Dan bagaimana kita dapat membekali dan melatih sumber daya manusia birokrasi dengan kompetensi dan kemampuan beretika untuk memenuhi kebutuhan Revolusi Industri 5.0?

METODE PENELITIAN

Untuk mengkaji kesulitan-kesulitan yang dihadapi etika birokrasi dalam konteks Revolusi Industri 5.0, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. mengkaji sebuah program, peristiwa, kegiatan, proses, atau sekelompok individu secara kolektif dikenal menjadi penelitian kualitatif. Masalah-perkara dibatasi oleh waktu dan kegiatan, dan para peneliti menggunakan berbagai taktik pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif dalam waktu yang dipengaruhi. (pada tahun 2019, Kusumastuti dan Khoiron)

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tinjauan literatur. Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan menggunakan topik persoalan etika yang dihadapi birokrasi dalam konteks revolusi 5.0. Data serta informasi yang terkumpul ditelaah dan dipadukan untuk menemukan perspektif baru mengenai permasalahan etika birokrasi pada konteks Revolusi 5.0.

HASIL DAN DISKUSI

Perubahan kerangka berpikir asal contoh konvensional menuju tata kelola pemerintahan yang lebih terbaru mencirikan lanskap etika birokrasi pada banyak wilayah di dunia, termasuk Indonesia, sebelum berkembangnya revolusi industri 5.0. telaah menyeluruh terhadap beberapa literatur ilmiah mengidentifikasi beberapa motif berulang yang mendefinisikan periode ini. menurut (Muliawaty, 2020), sistem birokrasi pra-digital dicirikan oleh hirarki yang tidak fleksibel, spesialisasi tugas yang ketat, serta istiadat-adat yang formalistik, mengacu pada teori birokrasi Max Weber seperti yang tersaji dalam Olsen (2006). Caiden (2016) beropini bahwa meskipun pola ini bertujuan buat memaksimalkan objektivitas dan efisiensi pelayanan, pola ini justru menghasilkan aparatur yang lamban serta kurang responsif terhadap perubahan kebutuhan publik. Terry L. Cooper (2012) dalam (Yasa, Suswanta, et al., 2021) menyoroti pentingnya prinsip-prinsip mirip kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam konteks etika pelayanan publik. Cooper menunjukkan bahwa budaya birokrasi yang anti-transparansi serta kurangnya prosedur supervisi terkadang menyulitkan buat mewujudkan tujuan-tujuan tadi. sementara itu, korupsi dan nepotisme terus menjangkiti birokrasi, terutama pada negara-negara berkembang. Menurut Rose-Ackerman & Palifka (2016), kurangnya prosedur whistleblower yang dapat dianggap, penegakan aturan yang lemah, serta keberpihakan politik merupakan beberapa alasan mendasar dari dilema ini. Selain itu, sistem manajemen informasi yang sudah ketinggalan zaman juga membatasi transparansi dan akuntabilitas, yang artinya landasan tata kelola pemerintahan yang efektif (World Bank, 2017) dalam (Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019). Heeks (2007) memberikan bukti bahwa akses informasi publik yang terbatas di era saat ini telah melemahkan keterlibatan dan kontrol publik terhadap operasi birokrasi. Lebih lanjut, studi oleh Peters dan Pierre (2018) menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk peningkatan profesionalisme birokrat pada banyak negara.

Kurangnya praktik perekrutan dan pelatihan yg sepenuhnya sesuai prestasi menyebabkan perbedaan pada kompetensi dan kesadaran karyawan akan perilaku etis. Meskipun demikian, era ini juga menjadi awal dari reformasi birokrasi. paradigma New Public Service lahir, menurut Denhardt & Denhardt (2020) dalam (Wirawan, 2020), serta membarui penekanan pelayanan publik berasal sekadar efisien atau melayani tujuan politik menjadi untuk kepentingan seluruh warga. Pergeseran asal kerangka berpikir Weberian yang ketat sebagai administrasi yang lebih fleksibel serta bermoral mendefinisikan lingkungan etis birokrasi pra-revolusi industri 5.0. Meskipun prinsip-prinsip seperti kejujuran, tanggung jawab, serta profesionalisme sudah diakui, hambatan mirip ketidakfleksibelan birokrasi, data yang tidak memadai, dan persoalan nepotisme serta korupsi terus menghalangi penerapannya. Menganalisis bagaimana Revolusi Industri 5.0 membawa gelombang perubahan serta kesulitan baru dalam etika birokrasi membutuhkan pemahaman tentang situasi ini.

Bidang etika birokrasi sedang mengalami pergolakan akbar sebagai dampak dari revolusi industri keempat. Menurut Schwab (2018) pada (Putri et al., 2024), kombinasi big data analytics, artificial intelligence (AI), serta Internet of Things (IoT) tidak hanya membuat kembali standar etika pada pelayanan publik tetapi juga mendesain ulang proses birokrasi secara menyeluruh. Meluasnya penggunaan data terbuka serta platform digital menyebabkan peningkatan tajam dalam transparansi birokrasi. Selain mendorong akuntabilitas yang lebih besar, akses real-time ke data publik, keputusan aturan, serta prosedur pengambilan keputusan juga mendorong keterlibatan rakyat negara pada kebijakan publik. Namun, keterbukaan digital pula menimbulkan bahaya bagi privasi dan keamanan data, yang menimbulkan teka-teki etika terbaru.

Lebih lanjut, Wirtz, Weyerer, & Geyer (2019) menunjukkan bagaimana kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan analitik prediktif mengganti prosedur pengambilan keputusan birokrasi. Efisiensi dan ketidakberpihakan layanan publik sangat ditingkatkan dengan alokasi asal daya dan pembuatan kebijakan berbasis AI. Namun, (Danaher, 2020) mengeluarkan peringatan perihal "algokrasi" sebuah fenomena di mana algoritme membentuk keputusan kebijakan menjadi pengganti manusia, yang menyebabkan kekhawatiran berfokus wacana keadilan dan akuntabilitas. Sementara itu, teknologi blockchain mengantarkan era baru pada memerangi nepotisme serta korupsi.

Blockchain mempunyai kemampuan untuk menghasilkan sistem pengadaan dan kepegawaian yang tidak dapat dimanipulasi. Meskipun demikian, kita harus tetap waspada terhadap kemungkinan adanya perlawanan dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh sistem yang tidak transparan. Dalam (Sukaridhoto, 2016) menyampaikan contoh bagaimana analisis data akbar

dan IoT menaikkan daya tanggap birokrasi. Birokrasi dapat bertindak cepat dalam menanggapi masalah publik, seperti stagnasi lalu lintas serta bencana alam, berkat analisis data dari perangkat IoT. tetapi, pengumpulan data yang masif juga dapat dipergunakan untuk melakukan supervisi yang berlebihan, sehingga membahayakan kebebasan sipil. Prinsip-prinsip dasar etika birokrasi-integritas, akuntabilitas, serta orientasi pada masyarakat-tetap sama dalam menghadapi kemajuan teknologi, berdasarkan Denhardt & Denhardt (2020) dalam (Bisri & Asmoro, 2019). Mereka hanya diekspresikan pada lingkungan digital yang lebih rumit.

Revolusi industri keempat menempatkan birokrasi pada persimpangan moral yang sulit. pada satu sisi, teknologi memang menjanjikan peningkatan daya tanggap, efisiensi, serta keterbukaan. namun, teknologi juga memunculkan teka-teki moral baru yang berkaitan dengan kebebasan sipil, keadilan algoritmik, serta privasi. Jelaslah bahwa dalam lanskap digital yang berubah pada masa ini, istiadat-norma etika birokrasi perlu didefinisikan ulang serta diimplementasikan kembali. Tsunami teknologi revolusi industri 4.0 tidak hanya mengubah penyediaan layanan publik, tetapi juga merujuk pada evaluasi etika birokrasi di seluruh dunia. menurut Floridi & Cowls (2019) dalam (Rahmawan, 2023), adopsi birokrasi terhadap blockchain, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), serta Internet of Things (IoT) telah memaksa penafsiran ulang terhadap etika dengan mempertimbangkan seluk beluk interaksi manusia-mesin dalam konteks pelayanan publik. aturan inovatif yang berkaitan dengan penggunaan AI serta data dalam birokrasi menjadi yang terdepan. Uni Eropa telah menetapkan standar baru untuk AI yang etis serta perlindungan data pribadi menggunakan Peraturan perlindungan Data umum (GDPR) serta Undang-Undang AI. Undang-undang ini mengharuskan birokrasi untuk memasukkan konsep privasi sesuai desain dan keadilan sesuai desain ke dalam sistem layanan publik yang memakai AI. di saat yang sama, Amerika Serikat mempromosikan penggunaan model AI yang dapat dijelaskan dan diaudit dengan mendorong entitas pemerintah untuk menggunakan AI dengan cara yang transparan, akuntabel, serta tidak diskriminatif melalui Perintah Eksekutif tentang Mempromosikan Penggunaan Kecerdasan buatan yang dapat dipercaya dalam Pemerintahan.

Werbach (2018) memperkenalkan konsep "lex cryptographica," atau peraturan terenkripsi pada smart contract, pada konteks teknologi blockchain. Konsep ini memiliki kemampuan untuk membentuk birokrasi yang tidak dapat diubah dan transparan. namun, sangat penting untuk diingat bahwa undang-undang yang mengklaim akses yang adil dan literasi digital diharapkan untuk menghentikan "kesenjangan digital" dalam layanan publik. ISO/IEC 27701 memberikan kerangka kerja buat manajemen privasi data sensor di sektor Internet of Things dan big data. Selain itu, Wagner (2019) dalam Firdhausi (2023) mempelajari IEEE Ethically Aligned Design, yg

memberikan panduan etika untuk kemajuan teknologi, termasuk dalam konteks birokrasi digital. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 perihal SPBE, yang mempromosikan kejujuran, keterbukaan, serta tanggung jawab dalam layanan publik digital, secara halus menyoroti etika pada e-government. Peraturan dan hukum yang berkaitan menggunakan etika birokrasi telah mengalami evolusi substansial sebagai hasil dari revolusi industri 4.0. norma-adat internasional serta nasional yang baru ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara penggunaan teknologi dan prinsip-prinsip moral, termasuk keadilan, privasi, serta transparansi. Kesulitannya saat ini ialah memastikan bahwa peraturan dan kebijakan ini menjadi fenomena di era birokrasi digital modern, dan tidak hanya menjadi kata-istilah.

Selain banyaknya teknologi baru, gelombang revolusi industri 4.0 telah menghadirkan lautan persoalan etika yang rumit serta beraneka ragam bagi birokrasi. setelah melakukan tinjauan literatur secara menyeluruh, penelitian ini memberikan 5 hambatan utama yang perlu diatasi oleh birokrasi untuk mempertahankan kompas moralnya pada zaman sekarang. Pertama, terdapat teka-teki privasi lautan data. menurut Zuboff (2019) dalam Rochami (2021), konsep "kapitalisme pengawasan" menjadi ancaman bagi privasi warga negara sebab banyaknya data yang didapatkan oleh pemerintah serta perangkat IoT. Big data menjanjikan layanan yang lebih individual dan efektif, tetapi sangat penting untuk diingat bahwa, Jika tidak ada keamanan yang kuat, informasi ini dapat berubah menjadi senjata yang membahayakan kebebasan serta keamanan rakyat negara. Algoritme yang mendiskriminasi merupakan yang kedua. O'Neil (2016) mengungkapkan bagaimana AI dalam birokrasi bisa menjadi indera ketidakadilan pada "Senjata Pemusnah Matematika" (Biorxiv n2, 2024). sungguh ironis bahwa, terlepas dari reputasi AI yang lebih adil daripada manusia, sistem AI yang memilih nasib masyarakat negara-dari kredit hingga donasi sosial-mungkin menyimpan prasangka yang memperlebar kesenjangan sosial ekonomi. Ketiga, "algokrasi" menghadapi persoalan akuntabilitas. Frasa yang diciptakan oleh Danaher (2020) ini menyoroti persoalan saat algoritme, alih-alih insan, yang bertanggung jawab untuk memutuskan kebijakan. Penerapan mekanisme akuntabilitas konvensional pada sistem AI yang rumit serta seringkali kali tertutup menjadi lama. Kesenjangan digital dalam layanan publik berada di urutan keempat.

Seperti yang diingatkan oleh "Teknologi dan Inklusi Sosial", tidak seluruh orang mempunyai akses yang sama terhadap teknologi. Akibatnya, layanan publik yang sepenuhnya digital berisiko menjadi penghalang yang tidak bisa ditembus oleh mereka yang kurang melek teknologi, yang bertentangan dengan inklusivitas dan keadilan. Kelima, menurunnya nilai-nilai kemanusiaan. "Surveillance After Snowden" mengingatkan kita akan kemungkinan terjadinya

dehumanisasi dalam pelayanan publik akibat meningkatnya penggunaan otomatisasi. Nilai-nilai inti dari etika pelayanan publik-ikut merasakan, kebijaksanaan, dan pertimbangan kontekstual-dapat dirusak oleh efisiensi algoritmik dan keseragaman. Terakhir, perlu dicatat kisah peringatan tentang "penjajahan global kehidupan oleh sistem" yang telah ada sebelum era digital. dalam konteks khusus ini, "sistem" dapat dipahami menjadi teknologi digital, yang memiliki potensi untuk menundukkan dan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan dalam birokrasi Jika tak ditangani secara etis. Tujuan dari mengidentifikasi kesulitan-kesulitan ini artinya untuk memastikan bahwa, saat kita menuju birokrasi digital, kita tidak kehilangan kompas moral kita, bukan buat menentang perkembangan. Tujuan primer dalam pelayanan publik yang beretika artinya buat memastikan bahwa efisiensi teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan saling melengkapi, seperti yang dicatat oleh Denhardt & Denhardt (2020) pada (Bisri & Asmoro, 2019)

Topik penggunaan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan hukum diangkat dalam kaitannya dengan pelestarian supremasi hukum. penekanan di kepedulian terhadap masyarakat menyoroti betapa pentingnya menjaga ikut merasakan pada sektor publik yang semakin terkomputerisasi. dengan memakai manajemen berbasis data buat optimalisasi proses, efektivitas dan efisiensi diperiksa. ketika membahas keadilan, pengembangan algoritma yang adil serta transparan diangkat. menyelidiki transparansi melibatkan pembuatan gosip yg sulit dimengerti oleh khalayak umum. Pelacakan keputusan berbasis AI menekankan pada akuntabilitas. Integritas dibicarakan pada kaitannya dengan keamanan data menggunakan teknologi blockchain. Kompetensi karyawan dalam menghadapi teknologi yang sedang berkembang dinilai menjadi ukuran profesionalisme. Secara umum , jurnal ini menyoroti betapa pentingnya keseimbangan antara norma-norma etika birokrasi lama serta inovasi teknologi untuk membentuk pemerintahan yg bertanggung jawab serta efisien pada era digital (Ramadhan et al., 2023)

Kemajuan pesat dalam otomatisasi, data besar , Internet of Things, kecerdasan buatan, serta bidang-bidang lainnya telah mengubah cara birokrasi beroperasi serta menghadirkan persoalan moral yang sulit. sementara digitalisasi layanan publik menguji kemampuan birokrasi untuk terus memperhatikan dan bersimpati pada tuntutan masyarakat, pengambilan keputusan berbasis algoritma menimbulkan kekhawatiran perihal akuntabilitas serta keadilan. Volume serta kompleksitas data yang terus bertambah mempersulit transparansi, dan gangguan digital menyebabkan risiko baru terhadap integritas data. Sulit bagi anggota staf birokrasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi. namun, teknologi juga memberikan peluang untuk meningkatkan efektivitas, ketepatan, serta aksesibilitas layanan publik. Jurnal ini menyoroti betapa pentingnya membingkai ulang ajaran moral birokrasi untuk era digital,

menyeimbangkan antara keunggulan teknologi dan prinsip-prinsip inti pelayanan publik, serta menciptakan kerangka kerja etis yang cukup fleksibel untuk menangani perubahan konstan yang terjadi dalam Revolusi Industri 5.0 (Budiyanto, 2023).

berbagai strategi dan inisiatif diperlukan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan. Strategi serta inisiatif ini mencakup berbagai topik, mulai dari peningkatan efisiensi penggunaan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan hingga reformasi birokrasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Baik di tingkat nasional maupun kota, institusi pemerintah sangat perlu meningkatkan kapasitas serta kompetensi sumber daya manusianya. Hal ini merupakan langkah awal yang penting untuk menyesuaikan diri dengan dinamika zaman yang terus berubah (Yasa, Rafi, et al., 2021)

Birokrasi harus mengalami perubahan mendasar dalam etos kerjanya, di mana birokrasi diharapkan bisa lebih reseptif dan sadar akan tujuan masyarakat. Sebagai hasil dari proses ini, para birokrat wajib mengadopsi nilai-nilai baru ke dalam sikap dan tindakan mereka ketika membantu masyarakat. Jawabannya terletak di penyesuaian pemikiran dan perilaku sumber daya manusia terhadap modernisasi pada konteks warga 5.0. Tujuannya ialah buat membentuk struktur birokrasi yang berpusat di manusia, efisien, berkelanjutan, menjaga ketertiban, serta lebih siap untuk menangani persoalan di masa depan (Sihite, 2018).

Gagasan tentang masyarakat birokrasi kemudian menjadi tujuan dari 5.0. Tujuan dari 5.0 ialah untuk menciptakan mesin negara yang dapat beradaptasi dengan perubahan dinamika sosial dan kemajuan teknologi. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan sumber daya manusia pemerintah yang kompetitif. Integrasi teknologi dalam sistem pemerintahan diperlukan bisa menghasilkan aparatur yang menghubungkan lembaga-lembaga pada tingkat pusat serta daerah dan menjalankannya secara bersamaan. Selain meningkatkan efisiensi birokrasi, penerapan e-government akan sebagai langkah yang diperhitungkan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, dapat diandalkan, serta efisien. Hasilnya, transformasi digital birokrasi mendorong tujuan pembangunan yang lebih besar serta menaikkan standar layanan publik daripada sekadar mengikuti mode terkini (Yasa, Suswanta, et al., 2021).

menurut (Tahar et al., 2022) peningkatan kapasitas soft skill untuk beradaptasi dengan era teknologi saat ini sangat penting untuk pengembangan dan penyiapan sumber daya manusia birokrasi. Faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menerima keunggulan kompetitif di era teknologi adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Digital melalui Keterampilan Digital

pada era teknologi saat ini, kapabilitas mencakup pengetahuan, keterampilan praktis, cara berpikir, dan kepekaan terhadap teknologi informasi. oleh karena itu, para pemimpin organisasi wajib berkonsentrasi untuk menciptakan inisiatif pelatihan karyawan untuk meningkatkan kemahiran mereka di bidang teknologi digital.

2. Pengembangan Kompetensi Digital

terdapat dua cara utama untuk menilai keberhasilan institusi dalam mengadopsi teknologi digital. Pertama, kemampuan digital institusi, yang meliputi kemahiran anggota staf dengan berbagai alat dan platform digital. Faktor kedua adalah seberapa baik institusi menggunakan teknologi digital pada kegiatan sehari-hari. ketika kedua komponen ini berfungsi dengan baik, lembaga tersebut telah secara efektif memasukkan teknologi digital ke dalam alur kerjanya. Pencapaian ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, namun juga menempatkan organisasi di posisi yang lebih kuat untuk bersaing dalam lanskap digital yang berubah dengan cepat.

3. Peningkatan Nilai manusia

Pengembangan sumber daya manusia, atau HRD, membahas sejumlah aspek penting pada mengembangkan karakter seseorang. Selain itu, tujuan dari pengembangan sdm adalah untuk meningkatkan kapasitas seorang dalam interaksi serta komunikasi yang produktif. Kemampuan untuk bekerjasama dengan orang-orang dari berbagai latar belakang serta tingkatan sosial ekonomi merupakan salah satu aspek yang tidak tertentu untuk satu kelompok sosial saja. Tujuan utamanya adalah membentuk orang-orang yang dapat beradaptasi serta bangkit kembali dari keadaan yang berubah dan pergeseran pada kehidupan sosial mereka.

setelah membangun landasan yang kuat melalui serangkaian inisiatif strategis, tahap berikutnya memerlukan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik secara komprehensif dan seragam. untuk menjamin bahwa tata kelola tidak hanya berhasil serta efisien tetapi juga mematuhi standar etika, akuntabilitas, serta keterbukaan yang ketat, prinsip-prinsip ini wajib dipraktikkan. untuk mencapai standar tata kelola yang baik, mekanisme administrasi pemerintahan wajib meliputi serta mengembangkan sejumlah karakteristik utama, berdasarkan program Pembangunan PBB (UNDP) atau ajaran ini dianggap menjadi hukum fundamental yang wajib menjadi dasar seluruh aspek pemerintahan. ide-ide ini dijelaskan di sini. Hal ini dianggap krusial untuk membentuk pemerintahan yang efisien, terbuka, serta bertanggung jawab (Rosika & Frinaldi, 2023).

1. Keterlibatan dalam masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat negara dalam urusan publik berperan sebagai pemicu untuk meningkatkan kesadaran akan keadaan dan kesulitan yang mereka hadapi menjadi sebuah kelompok. Melalui proses ini, masyarakat didorong untuk mendapatkan pengetahuan kritis tentang keadaan mereka serta mengambil inisiatif dalam membentuk solusi yang mampu diterapkan terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Sumardi (2010) mendefinisikan partisipasi menjadi keterlibatan aktif masyarakat atau komunitas pada proses pembangunan (Sulaeman et al., 2019). Keterlibatan ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari berbagi pemikiran serta gagasan sampai berpartisipasi aktif pada inisiatif pembangunan. kontribusi bisa dalam berbagai bentuk, seperti penerapan kecerdasan seseorang, pekerjaan fisik, komitmen ketika, spesialisasi, dukungan keuangan, atau penyediaan hal-hal yang konkret. Partisipasi menekankan hak warga buat menikmati serta merogoh keuntungan dari yang akan terjadi proses pembangunan, lebih berasal sekedar memberikan kontribusi.

2. Hukum

Penerapan supremasi hukum mengharuskan sistem aturan yang ada ketika ini didasarkan pada gagasan keadilan dan semua orang mematuhi. Gagasan ini menyoroti perlunya seluruh pejabat serta lembaga yang bertanggung jawab melayani masyarakat untuk senantiasa mengacu dan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pada memberikan pelayanan publik. dengan istilah lain, penyediaan layanan publik tidak boleh berubah-ubah atau didasarkan pada interpretasi subjektif, tetapi wajib sejalan menggunakan standar hukum yang sudah ditetapkan. Selain mencegah anomali atau prasangka dalam proses pemberian layanan, prinsip ini berupaya menjamin adanya standar yang adil, seragam, dan transparan dalam pemberian layanan pada seluruh lapisan masyarakat (Rohman & Hanafi, 2019)

3. Keterbukaan

salah satu prinsip utama gagasan tata pemerintahan yang baik artinya transparansi. Prinsip ini mendeskripsikan skenario di mana masyarakat umum memiliki akses serta pemahaman terhadap setiap aspek serta tahapan proses pemberian layanan publik. saat pelayanan publik bersifat transparan, informasi mengenai proses, kebijakan, serta pengambilan keputusan dapat diakses secara terbuka oleh semua pihak yang berkepentingan serta tidak dirahasiakan. Hal ini memungkinkan pemantauan publik yang efisien dan mengklaim bahwa setiap orang di masyarakat, terutama mereka yang berkepentingan langsung, dapat memahami bagaimana pelayanan publik dijalankan (Iza et al., 2022)

4. fokus pada konsensus

dalam (Dailiati & Sudaryanto, 2017), Deddy Mulyadi (2015) menegaskan bahwa pemerintahan yang berorientasi pada konsensus, atau sukses, bertujuan untuk mempertemukan berbagai sudut pandang serta beragam kepentingan pada masyarakat. Tujuannya ialah untuk mencapai mufakat yang dapat memenuhi kebutuhan sebagian besar masyarakat, khususnya dalam hal pembuatan kebijakan serta proses. Diperkirakan bahwa dengan menggunakan metode yang berorientasi pada konsensus ini, solusi ideal akan dikembangkan serta dianut secara luas oleh berbagai segmen masyarakat.

5. Keadilan

Prinsip ini menyoroti pentingnya menjamin akses yang adil terhadap layanan pemerintah bagi seluruh individu, tanpa memandang tingkat sosial atau latar belakang mereka. Lebih lanjut, konsep keadilan mensyaratkan keterbukaan serta pemahaman masyarakat luas terhadap hak-haknya sebagai penerima layanan. Oleh karena itu, keadilan pada konteks pelayanan publik mencakup lebih dari sekedar pemerataan distribusi layanan; hal ini juga mencakup pemberian informasi kepada rakyat tentang hak serta harapan mereka pada setiap langkah proses pemberian layanan ((Iza et al., 2022)).

6. efektivitas dan efisiensi

dua prinsip primer kebijakan pemerintah serta implementasi acara artinya kemanjuran serta efisiensi. Efektivitas artinya kemampuan untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud dan memenuhi tujuan yang sudah ditentukan. sementara itu, efisiensi berkaitan menggunakan penggunaan sumber daya—terutama aturan—sebaik-baiknya. penting bagi pemerintah untuk mendistribusikan dan menggunakan dana publik secara bijaksana, memastikan bahwa setiap pengeluaran sejalan dengan kebutuhan aktual serta memaksimalkan manfaat rakyat (Handayani & Nur, 2019)

7. Pandangan strategis

Visi jangka panjang beserta yang dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat dikenal menjadi visi strategis. menciptakan perekonomian dengan kesejahteraan masyarakat sebagai intinya adalah tujuannya. Visi ini terdiri berasal sejumlah strategi serta inisiatif yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan nasional. Meskipun terdapat banyak hambatan, suatu negara dapat tetap relevan serta berkelanjutan dengan mengikuti arah yang jelas dan berkala. Pendekatan taktis ini memungkinkan negara untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan eksternal sambil tetap menekankan pencapaian tujuan-tujuan penting (Handayani & Nur, 2019)

8. Kemampuan pemerintah buat secara proaktif mengantisipasi dan memahami kebutuhan masyarakat, bahkan sebelum tuntutan tersebut diungkapkan secara tegas, disebut dengan daya tanggap. oleh karena itu, pemerintah wajib peka dan mampu mengamati, mempelajari, dan mengevaluasi dinamika sosial dan kebutuhan aktual masyarakat. Pemerintah kemudian mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang relevan dan bermanfaat untuk mengatasi tuntutan ini sesuai pemahaman mendalam tersebut (Permatasari, 2020).

Landasan pengembangan etika birokrasi dalam rangka kepatuhan terhadap aturan terkait diperkirakan merupakan penerapan konsep tata kelola yang baik. Mesin birokrasi diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara lebih bertanggung jawab, transparan, serta profesional dengan menerima serta menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten. Hal ini pada akhirnya akan menjadikan struktur pemerintahan yang lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan persyaratan aturan saat ini serta harapan masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan jurnal ini menekankan betapa pentingnya menerapkan praktik tata kelola yang baik dalam pelayanan publik guna meningkatkan standar tata kelola. Berdasarkan penelitian, kekakuan struktural, kesenjangan informasi, nepotisme, serta persoalan korupsi terus menghambat penerapan etika termasuk profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas. Transparansi, ketepatan waktu, serta keadilan dalam pelayanan publik semuanya ditentukan oleh perubahan besar yang ditimbulkan oleh revolusi industri 4.0 dan 5.0 berkat teknologi seperti IOT, AI, serta analisis data besar. Namun teknologi ini juga membawa persoalan terkait kebebasan sipil, privasi, dan diskriminasi algoritmik, yang memerlukan undang-undang dan standar moral baru. Untuk mencapai tata kelola yang efektif dan berorientasi pada kemanusiaan, transformasi digital serta penerapan konsep tata kelola yang baik seperti keterbukaan, keadilan, dan keterlibatan publik sangatlah penting. Selain itu, penelitian ini menawarkan rekomendasi untuk penelitian masa depan yang dapat mengatasi kekurangan yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59–76. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>
- Budiyanto, A. (2023). Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Lembaga Pemerintah: Meningkatkan Efisiensi dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik. [Www.Djkn.Kemenu.Go.Id](http://www.djkn.kemenu.go.id).
- Dailiati, S., & Sudaryanto, H. D. (2017). PRINSIP - PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Good Governance . Good adalah suatu kesepakatan pengaturan negara yang dan government menyangkut diciptakan Penyelenggaraan pemerintahan di kenal istilah Good Government bersama ole. 9(2), 1–8.
- Danaher, J. (2020). Freedom in an Age of Algoracry. *The Oxford Handbook of Philosophy of Technology*, 250–272. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190851187.013.16>
- Fadli, M. R. (2021). Hubungan Filsafat dengan Ilmu Pengetahuan dan Relevansinya Di Era Revolusi Industri 4.0 (Society 5.0). *Jurnal Filsafat*, 31(1), 130. <https://doi.org/10.22146/jf.42521>
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>
- Iza, I. N., Habibi, M. M., & Sukriono, D. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance dalaml Pelayanan Publik di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. *Jurnal Civic Hukum*, 7(4), 88–99.
- Karya Pamungkas, T., & Rosyanfikri, R. (2022). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Paradigma Madani*, 8(2), 36–45. <https://doi.org/10.56013/jpm.v8i2.1126>
- Maindoka, M. C., Kaunang, M., & Gosal, T. (2017). Etika pemerintahan dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan bersih (Suatu Studi di Kantor Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Eksekutif*, 1–11.
- Muliawaty, L. (2020). Pengantar Etika Birokrasi.
- Permatasari, I. A. (2020). Kajian Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintah Kabupaten Lebak. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 4(1), 33–48. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v4i1.99>
- Putri, D. N., Az-Zahra, F. E., Noviyanti, S., & Chan, F. (2024). Peran Pendidikan IPS dalam Meningkatkan Rasa Nasionalisme di Era Revolusi 4.0. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 2852–2866.

- Ramadhan, D. H., Pradana, S. A., & Alfajry, R. (2023). DAMPAK PENGGUNAAN AI DALAM ASPEK KEADILAN. *Informatics.Uii.Ac.Id.*
- Reonal, A., Putera, R. E., & Koeswara, H. (2024). Implikasi Penyederhanaan Birokrasi Terhadap Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara. *6(2)*, 760–766.
- Rohman, A., & Hanafi, Y. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Reformasi*, *9(2)*, 153. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>
- Rosika, C., & Frinaldi, A. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Padang. *2(09)*. <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i09.587>
- Sihite, M. (2018). PERAN KOMPETENSI DALAM MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0: SUATU TINJAUAN KONSEPTUAL. *4*, 145–159.
- Sukaridhoto, S. (2016). Bermain dengan Internet Of Things & Big Data.
- Sulaeman, Z., Mustanir, A., & Muchtar, A. I. (2019). Partisipasi Masyarakat Terhadap Perwujudan Good Governance Di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, *7(3)*, 88–92. <https://doi.org/10.51817/prj.v7i3.374>
- Tahar, A., Setiadi, P. B., Rahayu, S., Stie, M. M., & Surabaya, M. (2022). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *6(2)*, 12380–12381.
- Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, *6(11)*, 951–952., *2(1)*.
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *1(1)*, 1–16. <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>
- Yasa, A., Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Fadhlurrohman, M. I. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia Strengthening Bureaucratic Reform Towards Society 5.0 Era in Indonesia. *20(01)*, 27–42.
- Yasa, A., Suswanta, S., Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Iqbal Fadhlurrohman, M. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *20(1)*, 27–42. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.139>
- Zega, Y. (2018). Analisis Penerapan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, *1(2)*, 99–104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v1i2.24>

